

LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN
SURVEI PERSEPSI KORUPSI
PADA
PENGADILAN NEGERI
TANGERANG KELAS 1 A KHUSUS
SI SUPER

Juli sampai dengan September 2022

LEMBAR PENGESAHAN

**LAPORAN
SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI
PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN
DI PENGADILAN NEGERI TANGERANG
KELAS 1 A KHUSUS**

**Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi
Nomor 14 Tahun 2017**

Disahkan di Tangerang,
Pada Hari Kamis , 06 Oktober 2022

Management Reprerentative



KHAMIM THOHARI, S.H.,M.Hum.
Nip. 19671203 199212 1 001

Ketua Tim Survei



EMY TJAHHANI W, S.H.,M.Hum
Nip. 19690504 199203 2 003

**KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
KELAS 1 A KHUSUS**



BARITA SINAGA, S.H.,M.H.
Nip. 19581111 199212 1 001

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud Dan Tujuan	2
1.3. Landasan Hukum.....	2
1.4. Rencana Kerja	3
BAB II	5
METODOLOGI	5
2.1. Metode Penelitian	5
2.2. Populasi Dan Sampel	5
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis	5
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control	6
2.5. Teknik Analisis Data	6
2.6. Tahapan pelaksanaan.....	7
BAB III	9
INDEKS PERSEPSI KORUPSI	9
3.1. Profil responden.....	9
3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator	11
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan	21
3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan.....	24
BAB IV	25
PENUTUP	25
4.1. Kesimpulan.....	25
4.2. Rekomendasi	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.

- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner.
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
 - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang

mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.

- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval 3 Bulan.

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri/Tinggi.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu satu bulan atau data minimal 100 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan

Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1

Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel 2

Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Biaya
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 3

Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III

INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3.1. Profil responden

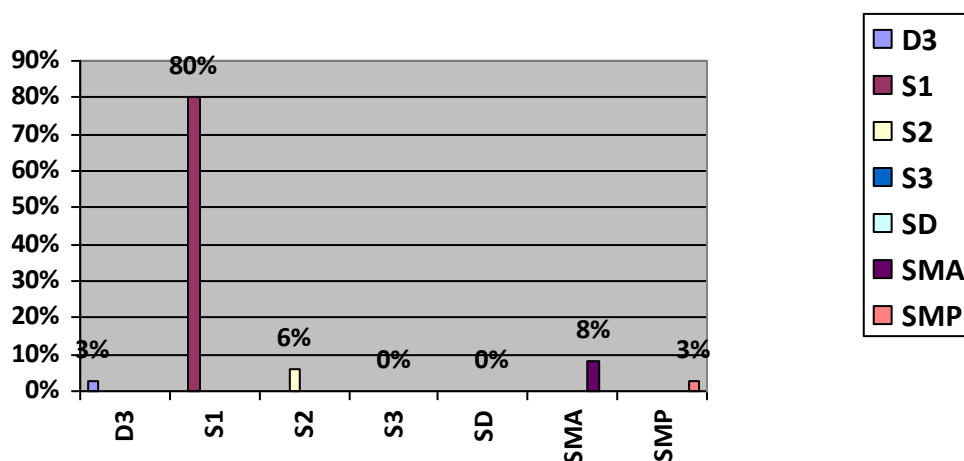
3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada pengadilan mayoritas memiliki latar Dasar dan Menengah.

Tabel 4.

Tingkat pendidikan responden

No.	Pendidikan	Nilai	%
1	D3	1	3%
2	S1	28	80%
3	S2	2	6%
4	S3	0	0%
5	SD	0	0%
6	SMA	3	8%
7	SMP	1	3%
	Total	35	100%



Tingkat pendidikan responden

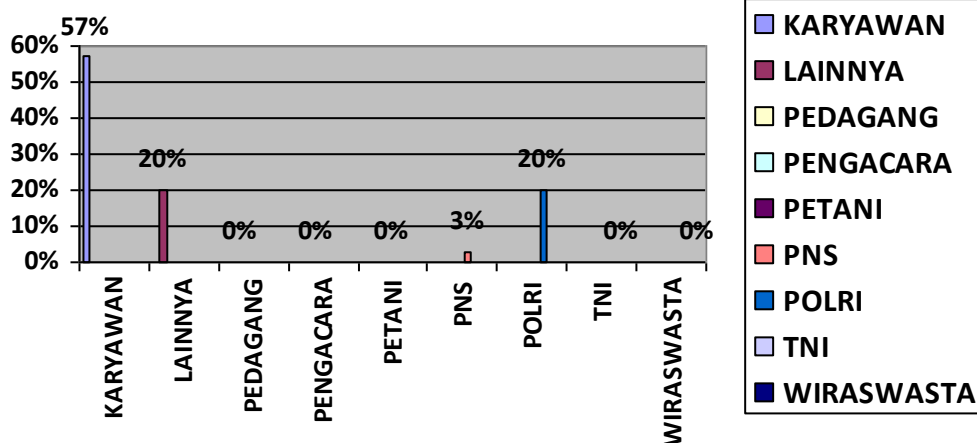
3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 50 % responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Tangerang memiliki pekerjaan sebagai Pekerjaan Lainnya.

Tabel 5.

Jenis pekerjaan responden

No.	Pekerjaan	Nilai	%
1	KARYAWAN	20	57%
2	LAINNYA	7	20%
3	PEDAGANG	0	0%
4	PENGACARA	0	0%
5	PETANI	0	0%
6	PNS	1	3%
7	POLRI	7	20%
8	TNI	0	0%
9	WIRASWASTA	0	0%
	Total	35	100%



3.1.3. Domisili responden

Dari data yang terkumpul selama survei, diperoleh

data bahwa berdasar domilisi, responden paling banyak berasal dari Wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang

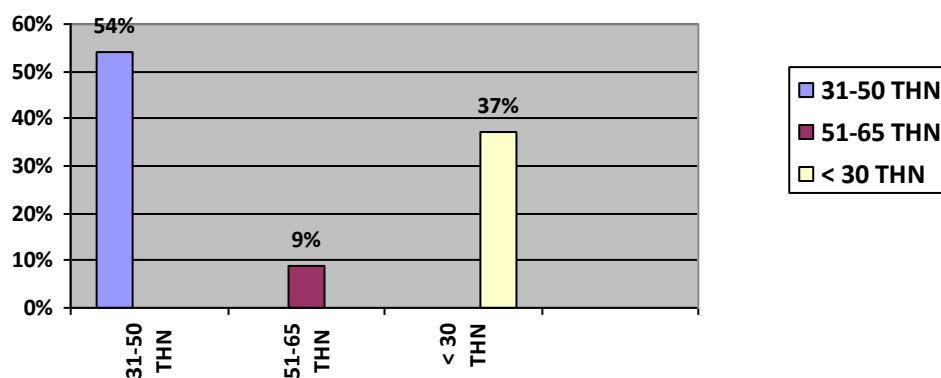
3.1.4. Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 21 tahun s/d 60 tahun. Bagi kelompok usia di atas 55 tahun, jumlah responden semakin mengecil, demikian pula kelompok usia di bawah 21 tahun.

Tabel 7.

Usia responden

No.	Usia	Nilai	%
1	31-50 THN	19	54%
2	51-65 THN	3	9%
3	< 30 THN	13	37%
	Total	35	100%



3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index **3.94**

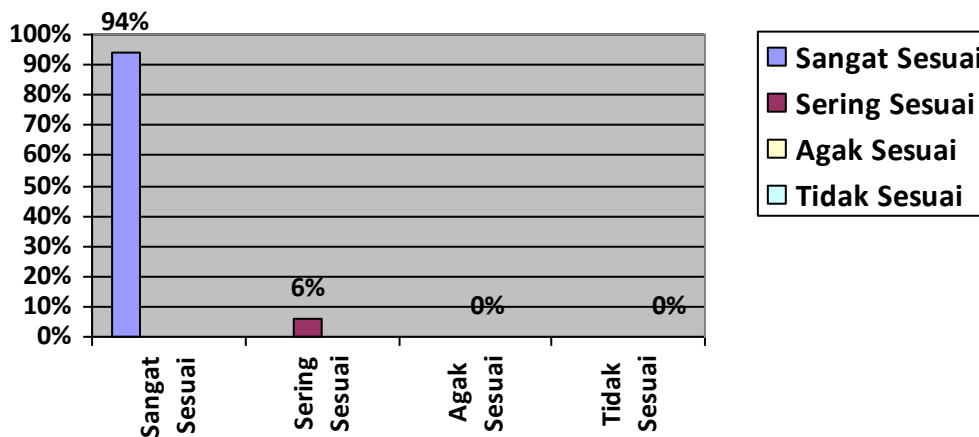
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Tangerang Bersih dari Korupsi

Tabel 9.

Indeks pada indikator manipulasi peraturan

No	Kinerja	Frekuensi	%
1	Sangat Sesuai	33	94%
2	Sering Sesuai	2	6%
3	Agak Sesuai	0	0%
4	Tidak Sesuai	0	0%
	Total	35	100%

Indeks pada indikator manipulasi peraturan



3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index **3.97**

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Kerja pada

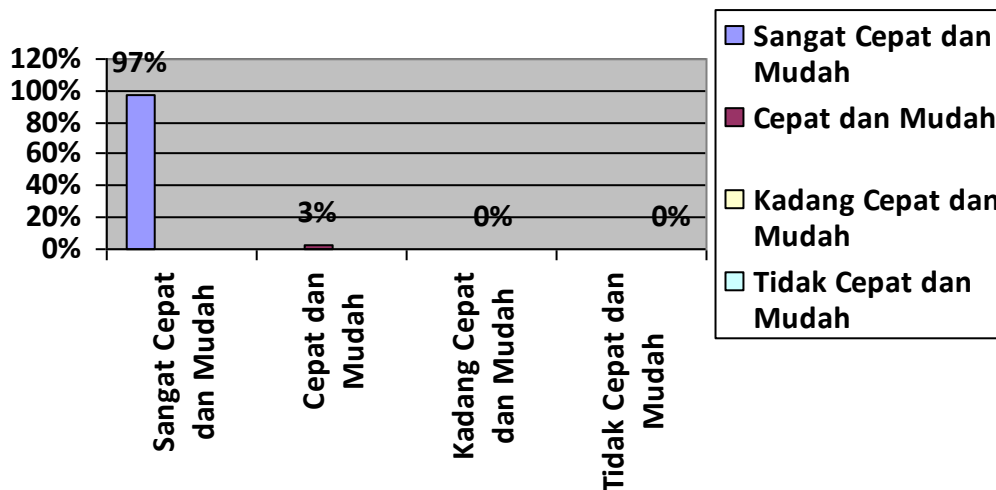
Pengadilan Negeri Tangerang bersih dari Korupsi.

Tabel 10.

Indeks pada penyalahgunaan jabatan

No	Kinerja	Frekuensi	%
1	Sangat Cepat dan Mudah	34	97%
2	Cepat dan Mudah	1	3%
3	Kadang Cepat dan Mudah	0	0%
4	Tidak cepat dan mudah	0	0%
	Total	35	100%

Indeks pada penyalahgunaan jabatan



3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index **4.00**

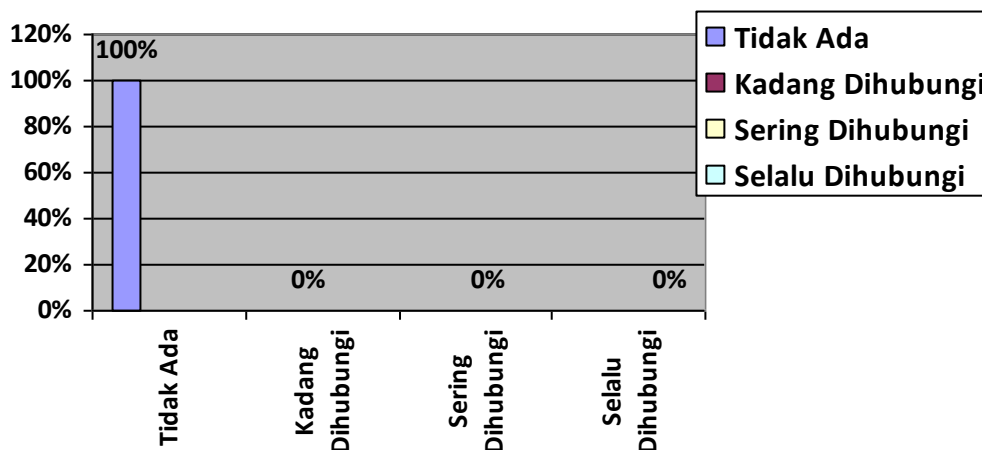
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Tangerang Bersih dari Korupsi.

Tabel 11.

Indeks pada indikator menjual pengaruh

No	Kinerja	Frekuensi	%
1	Tidak Ada	35	100%
2	Kadang Dihubungi	0	0%
3	Sering Dihubungi	0	0%
4	Selalu Dihubungi	0	0%
	Total	35	100%

Indeks pada indikator menjual pengaruh



3.2.4. Indikator Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index **3.77**

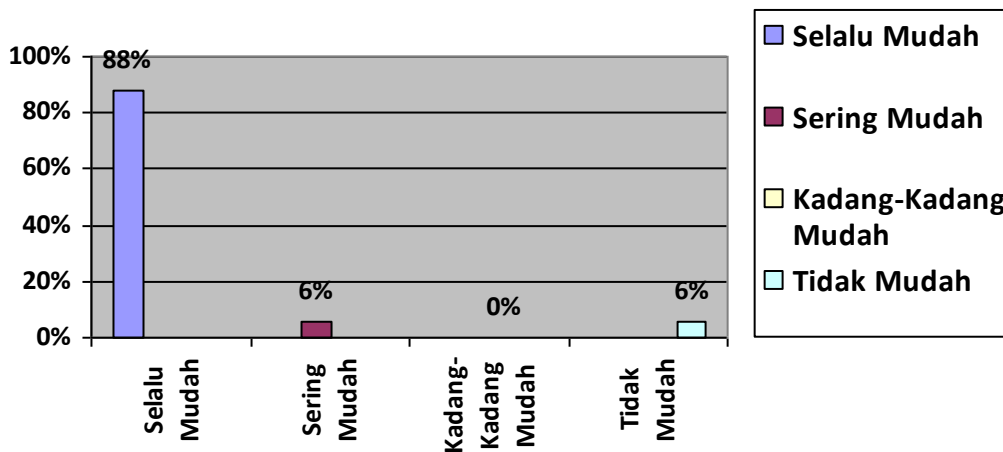
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Tangerang cukup bersih dari Korupsi.

Tabel 12.

Indeks pada indikator transaksi biaya

No	Kinerja	Frekuensi	%
1	Selalu Mudah	31	88%
2	Sering Mudah	2	6%
3	Kadang-Kadang Mudah	0	0%
4	Tidak Mudah	2	6%
	Total	35	100%

Indeks pada indikator transaksi biaya



3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index **3.82**

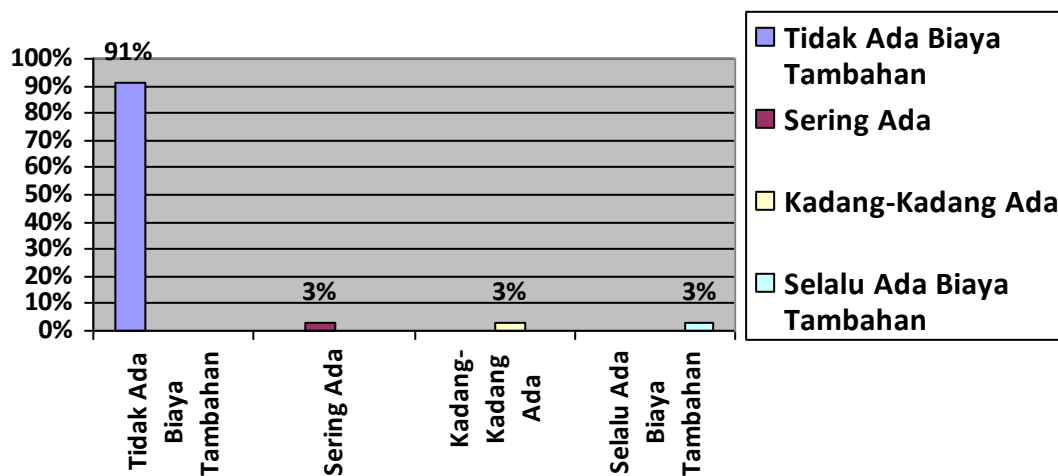
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Tangerang Bersih dari Korupsi

Tabel 13.

Tabel indeks pada indikator Tambahan Biaya

No	Kinerja	Frekuensi	%
1	Tidak Ada Biaya Tambahan	32	91%
2	Sering Ada	1	3%
3	Kadang-Kadang Ada	1	3%
4	Selalu Ada Biaya Tambahan	1	3%
	Total	35	100%

Tabel indeks pada indikator Tambahan Biaya



3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index **3.77**

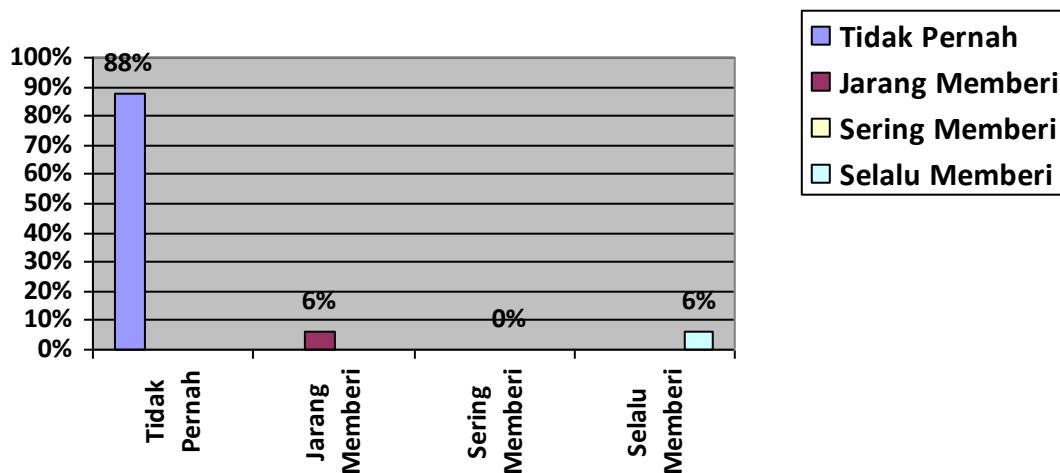
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Tangerang Bersih dari Korupsi

Tabel 14.

Indeks pada indikator Hadiah

No	Kinerja	Frekuensi	%
1	Tidak Pernah	31	88%
2	Jarang Memberi	2	6%
3	Sering Memberi	0	0%
4	Selalu Memberi	2	6%
	Total	35	100%

Indeks pada indikator hadiah



3.2.7. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index **3.88**

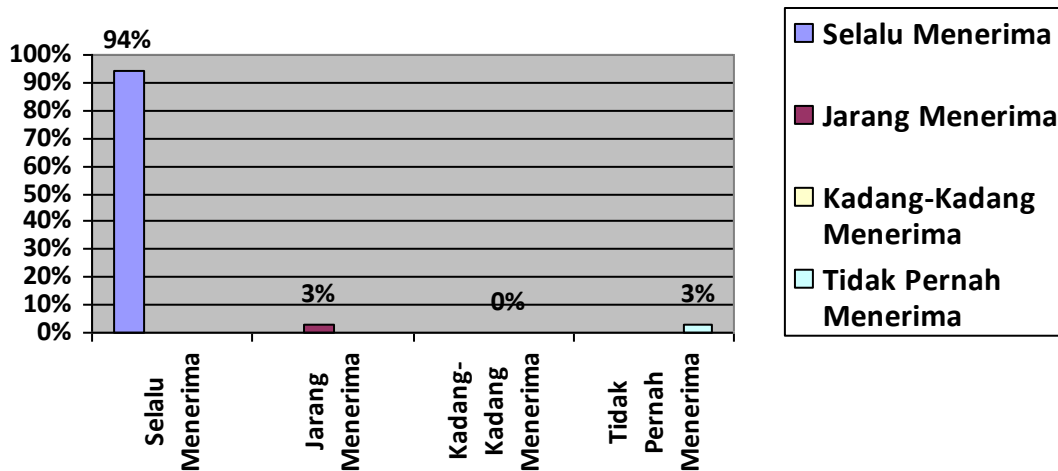
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Tangerang Bersih dari Korupsi

Tabel 15.

Indeks pada Transparansi Biaya

No	Kinerja	Frekuensi	%
1	Selalu Menerima	33	94%
2	Jarang Menerima	1	3%
3	Kadang-Kadang Menerima	0	0%
4	Tidak Pernah Menerima	1	3%
	Total	35	100%

Indeks pada Transparansi Biaya



3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index **3.97**

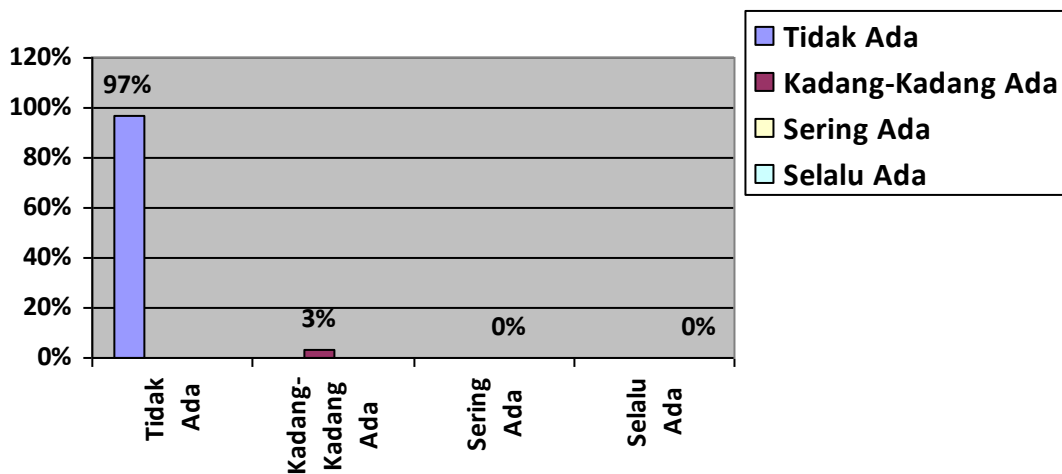
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Tangerang Bersih dari Korupsi

Tabel 16.

Indeks pada indikator percaloan

No	Kinerja	Frekuensi	%
1	Tidak Ada	34	97%
2	Kadang-Kadang Ada	1	3%
3	Sering Ada	0	0%
4	Selalu Ada	0	0%
	Total	35	100%

Indeks pada indikator Percaloan



3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index **3.91**

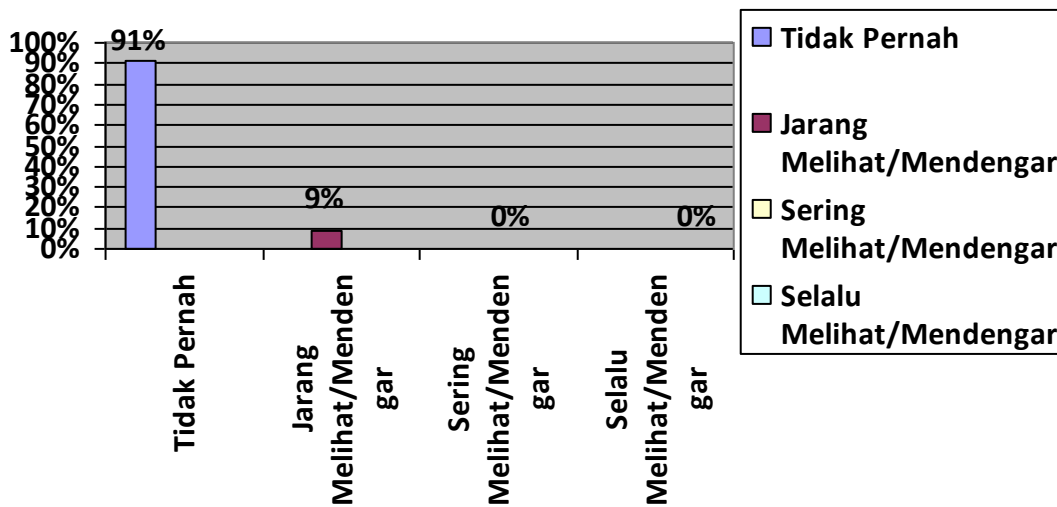
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Tangerang Bersih dari tindakan Percaloan.

Tabel 17.

Indeks pada indikator perbuatan curang

No	Kinerja	Frekuensi	%
1	Tidak Pernah	32	91%
2	Jarang Melihat/Mendengar	3	9%
3	Sering Melihat/Mendengar	0	0%
4	Selalu Melihat/Mendengar	0	0%
	Total	35	100%

Indeks pada indikator perbuatan curang



3.2.10. Indikator Perbuatan Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index **3.94**

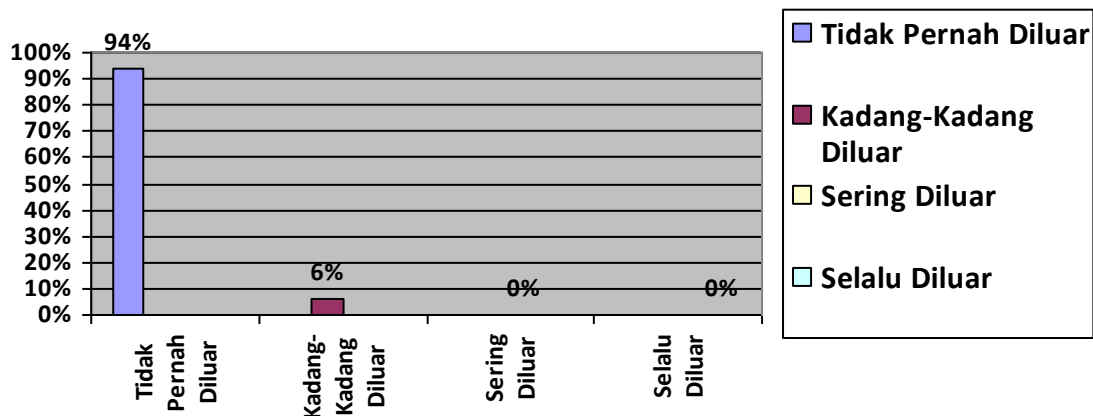
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja

pada Pengadilan Negeri Tangerang Bersih dari Korupsi.

Tabel 18.
Indeks pada indikator Transaksi Rahasia

No	Kinerja	Frekuensi	%
1	Tidak Pernah diluar	33	94%
2	Kadang-Kadang Diluar	2	6%
3	Sering diluar	0	0%
4	Selalu Diluar	0	0%
	Total	35	100%

Indeks pada indikator Transaksi Rahasia



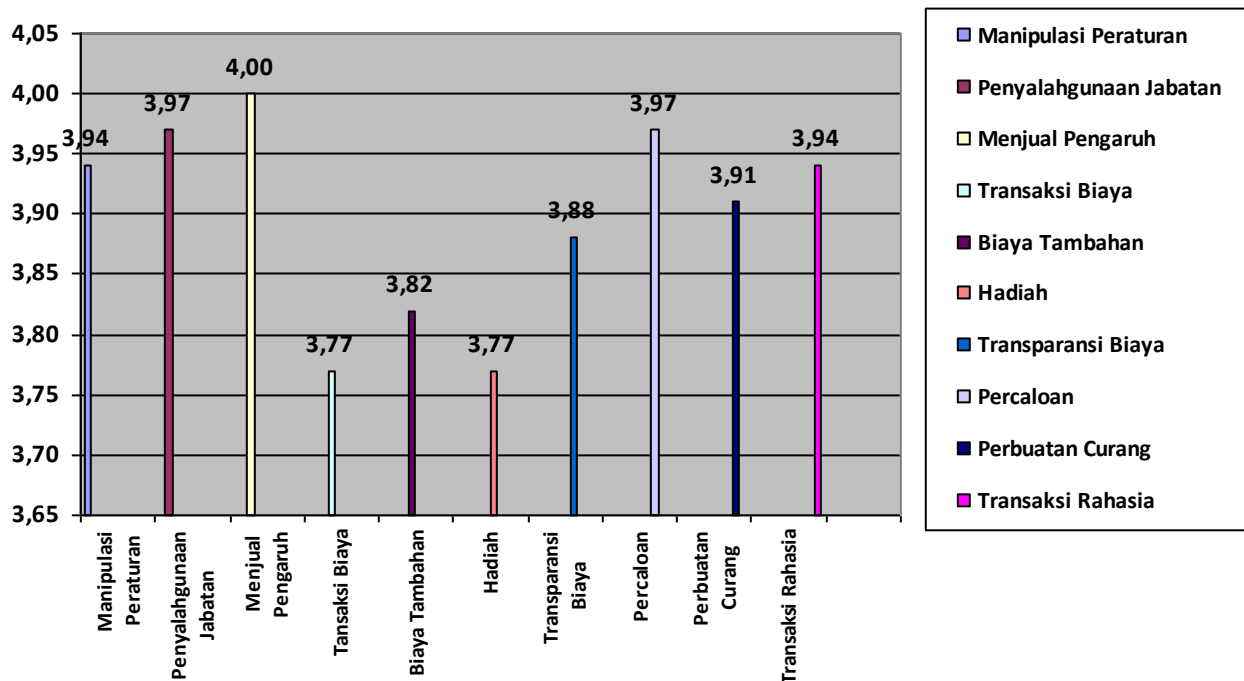
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Tangerang

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Tangerang sebesar 3.90

Tabel 19.
Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada
Pengadilan Negeri Tangerang

No	Unsur Pertanyaan	Nilai	Kategori
1	Manipulasi Peraturan	3.943	Bersih dari Korupsi
2	Penyalahgunaan Jabatan	3.971	Bersih dari Korupsi
3	Menjual Pengaruh	4.000	Bersih dari Korupsi
4	Transaksi Biaya	3.771	Bersih dari Korupsi
5	Biaya Tambahan	3.829	Bersih dari Korupsi
6	Hadiah	3.771	Bersih dari Korupsi
7	Transparansi Biaya	3.886	Bersih dari Korupsi
8	Percaloan	3.971	Bersih dari Korupsi
9	Perbuatan Curang	3.914	Bersih dari Korupsi
10	Transaksi Rahasia	3.943	Bersih dari Korupsi
	Total	3.900	

Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada
Pengadilan Negeri Tangerang



Indeks 3,90 tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 81,26 – 100.00

Tabel 20.
Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada
PENGADILAN NEGERI TANGERANG

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih

				dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjaring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Tangerang

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

Tabel 21.
Isian masukan dan pandangan pengguna layanan
Satuan Kerja pada pengadilan

No	Masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan
1	Pelayanan luar biasa dan situasi PTSP sejuk dan bersih.
2	Jelas instruksi, cepat, ramah.
3	Sangat baik pelayanan. Profesional. Sukses.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Tangerang diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Tangerang memiliki Indeks Persepsi Korupsi **3.900** atau masuk pada kategori **BERSIH DARI KORUPSI**

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks **3.943**
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks **3.971**
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks **4.000**
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks **3.771**
5. Indikator, Biaya Tambahan mendapat indeks **3.829**
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks **3.771**
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks **3.886**
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks **3.971**
9. Indikator, Perbuatan Curang mendapat indeks **3.914**
10. Indikator, Transaksi Rahasia mendapat indeks **3.943**

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2022 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3.97 atau masuk pada persepsi **BERSIH DARI KORUPSI** Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator 3.77 memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya.

ANALISIS DATA

SURVEI PERSEPSI KORUPSI PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN



PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS 1 A KHUSUS

Jl. TMP.TARUNA Tangerang - 15118, Telp. (021) 5524157 Fax. (021) 5524158

Web : www.pn.tangerang.go.id, Email : pn.tangerang@gmail.com

NILAI RUANG LINGKUP PELAYANAN											
No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
2	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
14	4	4	4	1	4	1	3	4	4	4	
15	3	3	4	4	2	3	1	4	4	3	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
22	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	
23	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
26	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	
27	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	

28	4	4	4	4	4	1	4	4	3	4	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	138	139	140	132	134	132	136	139	137	138	
	3,943	3,971	4,000	3,771	3,829	3,771	3,886	3,971	3,914	3,943	
	0,394	0,397	0,400	0,377	0,383	0,377	0,389	0,397	0,391	0,394	3.900
IPK Unit Pelayanan											97.50

Keterangan :

- RL = Ruang Lingkup Pelayanan
- NRR = Nilai rata-rata
- IPK = Indeks Persepsi Korupsi
- *) = Jumlah NRR IPK tertimbang
- **) = Jumlah NRR Tertimbang x 25
- NRR Per RL = Jumlah nilai per Ruang Lingkup dibagi dengan jumlah kuesioner yang terisi
- NRR tertimbang = NRR per ruang lingkup x (1/10)

IPK UNIT PELAYANAN : 97.50
Kategori: SANGAT BAIK

Mutu Pelayanan :

- A (Sangat Baik)** : 81,26 - 100,00 : 3,26 - 4,00
- B (Baik)** : 62,51 - 81,25 : 2,51 - 3,25
- C (Kurang Baik)** : 43,76 - 62,50 : 1,76 - 2,50
- D (Tidak Baik)** : 25,00 - 43,75 : 1,00 - 1,75